MAKALAH

PERAN DAN SOLUSI PANCASILA DALAM MENGATASI

PERSOALAN BANGSA

DOSEN PENGAMPUH:

HENNI MAWARNI, S.PD., M.PD.



DISUSUN OLEH:

DIKRA ARLITA (TIF231007)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS CORDOVA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, makalah ini dapat terselesaikan. Makalah ini disusun untuk menjelaskan dan menggali lebih dalam mengenai peran Pancasila, solusi yang dapat ditawarkan, dan relevansi hukum tidak tertulis dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan beradab.

Makalah ini disusun sebagai upaya untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang Pancasil sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila bukan sekadar lambang kebangsaan, melainkan pilar yang kokoh dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Dengan lima silanya, pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Harapannya, makalah ini dapat menjadi sumber ilmu dan pemahaman lebih lanjut tentang Pancasila, dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca.

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat dan dapat menjadi wahana untuk lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila

Taliwang, Desember 2023

Penyusun

**DAFTAR ISI**

Table of Contents

[BAB I 4](#_Toc154786183)

[PENDAHULUAN 4](#_Toc154786184)

[**1.1** **Latar Belakang** 4](#_Toc154786185)

[**1.2** **Rumusan Masalah** 5](#_Toc154786186)

[**1.3** **Tujuan** 5](#_Toc154786187)

[**BAB II** 6](#_Toc154786188)

[**PEMBAHASAN** 6](#_Toc154786189)

[**2.1** **Masa depan pancasila dalam membangun bangsa** 6](#_Toc154786190)

[1. **Peran pancasila sebagai sumber hukum dalam menegakan keadilan** 6](#_Toc154786191)

[**2.** **Peran pancasila untuk membangun karakter bangsa** 6](#_Toc154786192)

[**3.** **Pilar penting dalam kemajuan negara Indonesia** 7](#_Toc154786193)

[**2.2 Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa Indonesia** 8](#_Toc154786194)

[**2.3** **Hukum tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan Pancasila** 9](#_Toc154786195)

[**2.3.1** **Sistem Hukum Adat** 9](#_Toc154786196)

[**2.3.2** **Sistem Hukum Islam** 12](#_Toc154786197)

[**BAB III** 13](#_Toc154786198)

[**PENUTUP** 13](#_Toc154786199)

[**3.1** **Kesimpulan** 13](#_Toc154786200)

[**3.2** **Saran** 13](#_Toc154786201)

BAB I

PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Pancasila jelas merupakan dasar negara. Pancasila adalah karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa dan akan menjadi bintang terang bagi bangsa Indonesia di masa mendatang, hal itu digunakan sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai alat untuk memupuk kerukunan bangsa, pancasila telah dideklarasikan sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa Pancasila kuat dan tahan terhadap perubahan politik di negara ini. Yang pertama adalah karena Pancasila secara intrinsik mengandung toleransi, dan setiap orang yang menentangnya berarti dia menentang toleransi. Kedua, Pancasila adalah wadah yang fleksibel yang dapat mencakup ide-ide positif yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan ide-ide positif lainnya, yang memiliki kebebasan yang cukup untuk berkembang. Yang ketiga, Pancasila terdiri dari nilai dan prinsip yang baik yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, orang Indonesia yang benar-benar menghormati Pancasila percaya bahwa itu benar dan tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan mereka.

Para pendiri Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasti ingin membangun sistem ketatanegaraan terbaik untuk bangsa ini. Yang terbaik adalah yang sesuai dengan keanekaragaman etnis, agama, dan sosial budaya di negara ini. Karenanya rakyat memegang kedaulatan, mekanismenya adalah permusyawaratan dan perwakilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan sistem demokrasi, yang berarti bahwa rakyat memegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam batas-batas hukum. Dalam pasal ini, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dalam tertib perundang-undangan.Oleh karena itu, orang-orang di negara-negara yang berdemokrasi seperti Indonesia menginginkan atau menuntut pemimpin mereka bertanggung jawab. Jadi dalam praktiknya, pemerintah yang demokratis tidak boleh melanggar hak asasi individu atau kelompok, tetapi harus melindunginya.

Mempelajari lebih lanjut tentang Pancasila membuat kita menyadari bahwa Indonesia memiliki jati diri dan harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan identitas budaya dan bermatabat bangsa kita. Diharapkan bahwa makalah ini akan memungkinkan kita untuk berpikir lebih kritis tentang apa arti Pancasila.

* 1. **Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:

1. Bagaimana masa depan pancasila dalam membangun bangsa

2. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa Indonesia

3. Hukum tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan pancasila

* 1. **Tujuan**

Dalam makalah ini, penulis mempunyai beberap tujuan, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana masa depan pancasila dalam membangun bangsa

2. Penajabaran tentang pancasila sebagai solusi persoalan bangsa Indonesia

3. Pengertian hukum tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan pancasila

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Masa depan pancasila dalam membangun bangsa**
2. **Peran pancasila sebagai sumber hukum dalam menegakan keadilan**

**penerapan hukum yang tegas untuk menjaga masyarakat yang adil. Ini dapat dicapai melalui tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan status sosial, ekonomi, atau politik pelaku. Penegakan hukum yang adil juga berarti memberikan perlindungan yang sama kepada semua tanpa membedakan.** Sistem peradilan yang independen dan transparan sangat penting untuk menegakkan keadilan. Sistem peradilan tidak boleh terpengaruh oleh politik dan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Keputusan harus dibuat tanpa terpengaruh oleh hal-hal di luar, berdasarkan hukum dan bukti yang jelas. Selain itu, hukum juga harus memastikan bahwa kemanusiaan dilindungi selama menjalankan segala aktivitasnya. Ini berarti bahwa hukum harus melindungi martabat manusia dan mencegah perlakuan yang merendahkan atau menyebabkan penderitaan. Hukum juga harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan mencegah tindakan yang merugikan kelompok tertentu.

1. **Peran pancasila untuk membangun karakter bangsa**

Pancasila memiliki lima sila yang dapat digunakan untuk mengembangkan karakter bangsa Indonesia. Dilihat dari asal-usul sila pertama "Ketuhanan yang maha esa", Indonesia digambarkan sebagai negara yang memiliki keyakinan dalam menjalani hidupnya. Karakternya pada dasarnya terdiri dari hati yang bersih dengan dasar keyakinan yang kuat. Dua, "kemanusiaan yang adil dan beradab" mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama, serta dijamin hak dan kebebasannya dalam hubungannya dengan tuhan, orang, negara, dan rakyat. Ketiga, konsep "Persatuan Indonesia" mengacu pada keadaan di mana orang Indonesia bersatu untuk saling membantu dan saling melengkapi, yang menghasilkan kehidupan humanis yang berbeda tetapi sama. Keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau saat membicarakan suatu hal.

Diharapkan bahwa dengan bermusyawarah, masalah atau hal yang sedang dibicarakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menyebabkan konflik atau masalah tambahan. Kelima, dalam "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", disebutkan bahwa masyarakat Indonesia harus bekerja sama untuk membangun karakter yang sama, yang baik, dan sesuai dengan isi pancasila.

1. **Pilar penting dalam kemajuan negara Indonesia**

Pembangunan nasional mencakup banyak bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, antara lain, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil serta memperkuat otoritas negara. Pancasila adalah falsafah yang digunakan dalam kehidupan nasional dan negara Indonesia. Pancasila dianggap sebagai kesatuan yang utuh dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan Indonesia karena mengandung beberapa nilai, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Berdasarkan nilai yang pertama, yaitu nilai dasar yang dapat berkembang dari cita-cita bangsa untuk menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera, ini dapat digunakan sebagai langkah pertama yang dapat dijadikan acuan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bermanfaat dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan nilai kedua, nilai instrumental, yang merupakan penjabaran nilai dasar, Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun program pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan umum. Pemerintah dapat menggunakan penjabaran nilai dasar ini sebagai pedoman untuk program pembangunan nasional. Dalam pembangunan bangsa, pemerintah dapat mengambil prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila untuk menentukan arah pembangunan yang lebih terencana dan tepat sasaran agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang sukses dan makmur dapat tercapai. Setiap sila dalam Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan bangsa.

**2.2 Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa Indonesia**

Perekat Kesatuan Bangsa: Pancasila membantu memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan menjunjung tinggi persatuan dalam konteks perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dengan menerapkan Pancasila, perbedaan dapat dihormati dan dikelola dengan baik. Landasan Keberagaman: Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta toleransi antarumat beragama, Pancasila memegang prinsip dasar keberagaman ini. Pancasila menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan mereka satu sama lain.

Sistem Pemerintahan Demokratis: Pancasila menekankan prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah untuk mencapai mufakat, keadilan sosial, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam situasi seperti ini, Pancasila berfungsi untuk mengantisipasi masalah yang akan datang bagi negara dengan mendorong warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa ada mekanisme yang adil dan terbuka. Penangkalan Radikalisme dan Ekstremisme: Pancasila menegaskan bahwa ideologi nasional inklusif dan menentang radikalisme dan ekstremisme. Filosofi Pancasila, seperti toleransi, gotong royong, dan persatuan, membantu melawan ideologi yang bertentangan dengan kebangsaan. Dengan mempromosikan Pancasila, masalah seperti radikalisasi dapat diantisipasi dan dikurangi.

Pembangunan Sosial dan Ekonomi yang Berkeadilan: Pancasila menganut prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mendorong negara untuk melakukan pembangunan yang merata dan adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pancasila memberikan jalan yang jelas untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, dan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

* 1. **Hukum tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan Pancasila**

Menurut van Apeldoorn, hakim hanyalah corong undang-undang dan tidak memiliki hati nurani. Aliran hukum bebas juga mengkritik fungsi hakim ini, berdasarkan teori hukum kodrat (manusia memiliki akal dan hati nurani) dan teori sosiologi hukum (hukum dalam masyarakat lebih banyak daripada hukum yang ditulis dan dikodifikasikan).

1. **Sistem Hukum Adat**

Adat hukum adalah sistem hukum yang dikenal di masyarakat Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat berasal dari peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan dalam kesadaran hukum masyarakat. Karena tidak tertulis dan berkembang, hukum adat dapat berubah dan berkembang. Penegak hukum adat sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat adat untuk menjaga kesejahteraan. istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hur gronje, kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang pakar hukum adat Hindia Belanda

Gagasan pembagian hukum adat pertama kali diusulkan oleh Cornelis van Vollenhoven. Menurut Puchta (1798-1846), murid von Savigny, hukum adat di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat. Menurut Puchta, hukum adat ini tidak dapat dijadikan hukum nasional hanya sebagai keyakinan bagi setiap orang di negara tersebut, dan nilai-nilainya juga tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, keculai hukum adat yang dimiliki, diyakini, dan dilaksanakan secara luas.

2 Hukum dalam Masyarakat Adat Berbicara mengenai hukum tak tertulis erat dengan keberadaan suatu masyarakat.Karena hukum tak tertulis lahir dan terbentuk dalam masyarakat.Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai macam individu yang menempati suatu wilayah tertentu dimana di dalamnya terdapat berbagai macam fungsi-fungsi dan tugas-tugas tertentu. Masyarakat dapat terbentuk akibat kesamaan genalogis, kultur, budaya, agama,atau karena ada di suatu teritori yang sama. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengartikan masyarakat adat sebagai “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”. Secara lebih sederhana kita bisa katakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan akan hukum adat berarti bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi dan ada lembaga adat yang masih berfungsi antara lain untuk mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi. Walaupun di banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh sebagian besar masyarakatnya. 9 Hukum Adat secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif.Disamping itu juga karena secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat. Memang selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamim kepastian hukum karena dalam menyelesaikan suatu masalah aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda. Lain dengan undang-undang yang memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum. Padahal hal tersebut belum tentu baik, tidak selamanya seseorang melakukan perbuatan dengan motif dan alasan yang sama. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh hukum tertulis. Pada dasarnya hukum adat dipatuhi karena: Hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri. Konsekwensinya adalah masyarakat harus mematuhi aturan tersebut.Sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat. Memiliki akibat hukum yang apabila tidak ditaati akan menimbulkan sanksi bagi para pelakunya. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya.Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan 10 tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis

1. **Sistem Hukum Islam**

Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia, menyebabkan perkembangan spiritual dan moral. Selama perjalanan sejarahnya, syariah Islam tetap memiliki peran penting. Hukum Islam tidak kehilangan peranannya dalam kehidupan masyarakat yang berkembang dengan munculnya imam-imam baru, yang dengan sendirinya dapat memenuhi

**BAB III**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan makalah tentang Pancasila sebagai landasan dan solusi membanggun bangsa, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia maka tidak mustahil citacita negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat terwujud. UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut jadi UUD itu mengatur mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan. Sedangkan konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terperihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis.rangka pembinaan Hukum Nasional, Hukum Adat memegang peranan yang sangat penting sebagiosumber utama, yaitu untuk memperoleh bahan-bahannya berupa asas-asas yang kemudian dapat dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis.

* 1. **Saran**

Pada hakikatnya baik hukum dasar tertulis ataupun hukum dasar tidak tertulis adalah seperangkat akidah atau aturan yang mengikat seluruh warga negara baik secara langsung dan tidak langsung. Namun realitasnya hal ini seringkali berbanding terbalik dengan semua konsep-konsep dasar negara, bahkan seringkali hukum dijadikan sebagai alat untuk meraih tujuan tertentu yang menguntungkan diri sendiri ataupun golongan tertentu, tentu saja hal ini sangat merugikan bangsa dan negara